

Problematika Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Arab di SMK Baitul Atieq Cepoko Berbek Nganjuk

Asmaul Husna

Abstrak:

Problem pengembangan kurikulum muatan lokal Bahasa Arab di SMK Baitul Atieq Cepoko Berbek Nganjuk adalah: a) penambahan mata pelajaran (Bahasa Arab) yang materinya merupakan bagian dari mata pelajaran pokok, sehingga banyak materi pelajaran yang tumpang tindih, b) banyak mata pelajaran pokok yang tidak memiliki waktu sesuai dengan yang telah ditentukan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, akibat dari banyaknya materi yang tumpang tindih dan c) muatan lokal tidak ditentukan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasarnya; 2) Problem tersebut terjadi karena: a) SMK Baitul Atieq belum mampu mengintegrasikan mata pelajaran pokok dan mata pelajaran tambahan, b) keterbatasan dana untuk mengembangkan SMK Baitul Atieq menjadi full-day madrasah, dan c) latar belakang SMK Baitul Atieq yang pada awalnya merupakan madrasah pesantren tradisional yang menentukan buku ajarnya berdasarkan tingkatan kitab; dan 3) Solusi yang dirumuskan untuk mengatasi problem tersebut adalah: a) melakukan sosialisasi dan bimbingan mengintegrasikan mata pelajaran pokok dan mata pelajaran tambahan, b) mengintegrasikan kurikulum nasional dan muatan lokal yang sesuai, dengan cara mengidentifikasi Standar SMK 2008, menambah muatan dan kedalaman materinya, serta mengembangkannya ke dalam buku ajar yang menggunakan bahasa Arab (*Durus Al lughatu Al 'arabiyah*), bahasa Arab, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, dan c) menyusun Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran tambahan yang tidak dapat menjadi bagian dari mata pelajaran pokok.

Kata kunci: Pengembangan muatan lokal, Muatan lokal Bahasa Arab.

A. Latar Belakang Penelitian

Penelitian ini dilatarbelakangi keinginan peneliti membantu SMK Baitul Atieq mengenali dan mencari solusi problematika pengembangan muatan lokal Bahasa Arab ke dalam kurikulumnya. Walaupun dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), satuan pendidikan diberi wewenang untuk menyusun kurikulum sesuai dengan kekhasannya namun SMK yang bernaung di bawah Yayasan Baitul Atieq Cepoko ini tidak

menggunakan wewenang itu dengan baik, sehingga pendidikan agama terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu 1) pendidikan agama Islam kurikulum nasional dan 2) pendidikan agama Islam kurikulum lokal yang menggunakan buku ajar berbahasa Arab (*Durus Al lughatu Al 'arabiyah*).

Baik guru PAI (sebutan bagi guru yang mengajar agama kelompok pertama) maupun guru Madin¹ (sebutan bagi guru yang mengajar agama kelompok kedua) mengeluhkan kurangnya alokasi waktu sehingga hasilnya tidak maksimal. Walaupun banyak materi yang sama substansinya namun materi tersebut tidak diorganisasikan sehingga banyak materi yang tumpang tindih dan tidak tuntas.

Muatan lokal merupakan bagian integral Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Mengenai pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan, “Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.”² Meskipun mata pelajaran dalam KTSP sudah mengakomodasi muatan lokal, karena dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan, namun dalam struktur kurikulum, muatan lokal dialokasikan waktunya tersendiri. Artinya, sebagaimana dikatakan Mulyasa, pengembangan muatan lokal dalam KTSP dilakukan dengan dua pendekatan; pertama dimasukkan ke dalam mata pelajaran pokok (dikembangkan dengan pendekatan

¹ Singkatan dari Madrasah Diniyah.

² *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional*, Pasal 1 ayat (15). Setelah PP tersebut dirubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013, pengertian KTSP tidak mengalami perubahan hanya saja penempatannya menjadi Pasal 1 ayat (20) dan Pasal 77M ayat (1).

integratif); dan kedua dikembangkan menjadi mata pelajaran tersendiri (dikembangkan dengan pendekatan monolitik).³

Pengembangan kurikulum muatan lokal, sebagaimana dijelaskan Mulyasa, telah dilakukan sejak digunakannya kurikulum 1984, khususnya di sekolah tingkat dasar. Dalam kurikulum tersebut, muatan lokal disisipkan pada berbagai bidang studi yang sesuai (menggunakan pendekatan integratif). Dalam kurikulum 1994, muatan lokal lebih diintensifkan lagi pelaksanaannya dengan tidak lagi disisipkan pada bidang studi, tetapi menggunakan pendekatan monolitik berupa bidang studi, baik bidang studi wajib maupun bidang studi pilihan.⁴

SMK Baitul Atieq ini menambah muatan pendidikan agama dan ilmu tata bahasa Arab dengan menambah mata pelajaran yang materinya merupakan bagian dari mata pelajaran pokok, sehingga banyak materi pelajaran yang tumpang tindih dan banyak mata pelajaran yang tidak memiliki waktu yang memadai. Semua mata pelajaran tambahan yang jumlahnya mencapai sepertiga dari seluruh kurikulum yang ditetapkan tersebut tidak ditentukan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)-nya melainkan ditentukan buku pelajarannya berupa buku yang ditulis dalam bahasa Arab yang dikenal dengan “Bahasa Arab” untuk kelas X-XI.

Di sini terdapat problem berupa kesenjangan antara teori penambahan mata pelajaran muatan lokal dengan penerapannya, yaitu penambahan mata pelajaran yang materinya sebenarnya dapat dikelompokkan kepada mata pelajaran pokok, sehingga banyak materi pelajaran yang tumpang tindih; penambahan mata pelajaran yang tidak

³ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 271.

⁴ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 40.

disertai dengan penambahan jam pembelajaran yang memadai, sehingga banyak mata pelajaran pokok yang tidak memiliki waktu sesuai dengan yang telah ditentukan Permendiknas nomor 22 tahun 2006; dan penambahan mata pelajaran yang tidak ditentukan SK dan KD-nya.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih SMK Baitul Atieq, Cepoko Berbek Nganjuk sebagai lokasi penelitian, karena di madrasah tersebut terdapat keunikan, yaitu kurikulum muatan lokal berupa beberapa mata pelajaran agama dan tata bahasa Arab yang mengalami tiga problem sebagaimana dijelaskan di atas. Muatan lokal, yang mencapai sepertiga dari seluruh kurikulum yang ditetapkan tersebut, dinilai mengganggu kurikulum nasional sehingga berpotensi untuk dihilangkan. Pernah ada wacana dari sebagian guru supaya kurikulum muatan lokal tersebut dikurangi sehingga kurikulum nasional mendapatkan alokasi waktu yang dibutuhkan, namun wacana tersebut mendapat tanggapan negatif dari masyarakat sebagai salah satu unsur *stake holder*.

Dari uraian di atas, penelitian problematika (kesenjangan antara teori dan penerapan) pengembangan kurikulum muatan lokal di SMK Baitul Atieq ini sangatlah diperlukan, guna membantu SMK Baitul Atieq dalam mengidentifikasi penyebab dan merumuskan solusi untuk mengatasinya.

B. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sebagaimana dijelaskan SNP, adalah “kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.”⁵ Dalam pengertian tersebut, terdapat dua hal yang menunjukkan dua karakteristik KTSP. Yang pertama, pemberian wewenang kepada satuan pendidikan untuk

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional, Pasal 1 ayat (15).

menyusun kurikulumnya sendiri. Yang kedua, sifat kurikulum yang operasional. Artinya, walaupun satuan pendidikan diberi wewenang tetapi kewenangan itu terbatas pada pengembangan operasionalnya. Sedangkan ketentuan mengenai Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi telah ditentukan secara nasional. Dengan demikian, KTSP dikembangkan dengan:

- a. Mengidentifikasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) sebagai SKL dan SI minimum yang harus dipenuhi.
- b. Mengidentifikasi kondisi (kekuatan dan kelemahan) yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan biaya.
- c. Mengidentifikasi kondisi (peluang dan tantangan) yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar, dunia industry dan dunia kerja, sumber daya alam, dan sosial budaya.

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dilakukan dengan mempertimbangkan asas dan prinsip pengembangan kurikulum:

- a. Asas Kurikulum

Pengembangan kurikulum, sebagaimana dikatakan Sri Minarti, memiliki keterkaitan yang erat dengan asas kurikulum yang mendasarinya, yaitu asas filosofis, asas psikologis, asas sosiologis, dan asas organisatoris.⁶

- b. Prinsip pengembangan kurikulum

Pengembangan KTSP, sebagaimana dijelaskan Permendiknas 22/2006, dilakukan dengan berdasar pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum:

⁶ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri* (Jogjakarta: Ar-ruz Media, 2011), 91.

- 1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.
- 2) Beragam dan terpadu
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.
- 3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
Kurikulum dikembangkan atas prinsip kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 4) Relevan dengan kebutuhan kehidupan
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berfikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.
- 5) Menyeluruh dan berkesinambungan
Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang

direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.

- 6) Belajar sepanjang hayat
Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.
- 7) Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan moto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

C. Muatan Lokal sebagai Bagian dari KTSP

Dalam struktur kurikulum yang merupakan bagian dari standar isi, dijelaskan bahwa komponen kurikulum mencakup: matapelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Struktur kurikulum dimaksud adalah sebagai berikut:

Struktur kurikulum SMK adalah sebagaimana dalam tabel berikut:⁸

Tabel 2.1

Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu			
	I	II	III	X dan XII
A. Mata Pelajaran				2

⁷ Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, bab II: A.

⁸ Lampiran Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, bab V.

Pendidikan Agama Islam				2
Pendidikan Kewarganegaraan				2
Bahasa Indonesia				4
Penjasorkes				2
Bahasa Inggris				4
Matematika				4
Ketrampilan Komputer dan Pengolahan Informasi				4
Fisika				2
Kimia				2
Ilmu Pengetahuan Alam				2
Kewirausahaan				2
Merakit personal computer				2
Melakukan instalasi sistem operasi dasar				2
Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH)				2
Menerapkan teknik elektronika analog dan digital dasar				2
Menerapkan fungsi peripheral dan instalasi PC				2
Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC dan peripheral				2
B. Muatan Lokal *)				
Bahasa Arab				1
Kajian kitab				2
Aswaja				2
C. Pengembangan Diri **)				
J u m l a h				49

Dari struktur kurikulum tersebut dapat dipahami bahwa muatan lokal merupakan bagian integral KTSP. Meskipun mata pelajaran dalam KTSP sudah mengakomodasi muatan lokal, karena dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan, namun dalam struktur kurikulum, muatan lokal dialokasikan waktunya tersendiri. Artinya, muatan lokal ada yang dimasukkan ke dalam mata pelajaran pokok dan ada yang dikembangkan menjadi mata pelajaran tersendiri.

Pengembangan Kurikulum muatan lokal dengan cara memasukkan materinya ke dalam mata pelajaran pokok yang sesuai dapat difahami dari pengertian KTSP, sebagaimana dijelaskan SNP, yaitu “Kurikulum satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.”⁹

Sedangkan pengembangan muatan lokal dengan cara menambah mata pelajaran, jika materinya tidak dapat disisipkan ke dalam mata pelajaran pokok karena tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran wajib yang ada atau terlalu luas substansinya, dapat difahami dari cakupan KTSP yang meliputi muatan lokal. Oleh karena itu, kriteria mata pelajaran muatan lokal, sebagaimana dijelaskan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, adalah mata pelajaran yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.¹⁰ Lebih jelas lagi Muhaimin dan kawan-kawan menjelaskan bahwa ketentuan materi muatan lokal yang dikembangkan dengan pendekatan monolitik berupa bidang studi materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran pokok atau terlalu luas substansinya.¹¹

Mata pelajaran muatan lokal, sebagaimana dijelaskan dalam pedoman dan implementasi pengembangan KTSP di Sekolah Menengah Kejuruan, harus dikembangkan SK dan KD-nya oleh satuan pendidikan.¹² Jam pembelajaran untuk muatan lokal, yang dikembangkan menjadi mata

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional, Pasal 1 ayat (15).

¹⁰ Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, bab II: B.

¹¹ Muhaimin et. al., *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, 95.

¹² Mapenda Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, *Pedoman dan Implementasi Pengembangan KTSP di Madrasah Ibtidaiyah* (Surabaya: Departemen Agama, 2009), 50.

pelajaran tersendiri, adalah 2 jam pembelajaran dalam satu minggu¹³ kecuali muatan lokal yang berupa pendidikan agama, maka dapat ditambah jumlah jam pembelajarannya sesuai kebutuhan. Penambahan jam pembelajaran untuk muatan pendidikan agama tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Pasal 5 ayat (8) dan (9) sebagai berikut:

- (8) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan.
- (9) muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi.¹⁴

Untuk mendukung kedalaman materi pendidikan agama Islam dan Bahasa Arab, satuan pendidikan dapat menggunakan buku ajar yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar bila memungkinkan, mengingat ajaran pokok agama Islam bersumber dari kitab-kitab yang berbahasa Arab. Untuk pemula, buku ajar berbahasa Arab tersebut dapat dibacakan *makna*-nya (setiapa kata diterjemah dalam bahasa daerah serta dijelaskan kedudukannya dalam kalimat) oleh guru dan ditulis oleh murid, sebelum akhirnya diterjemah ke dalam bahasa Indonesia oleh murid dengan bimbingan guru.

Pembelajaran dengan menggunakan buku ajar yang disusun dalam tiga bahasa sebagaimana dijelaskan di atas merupakan bentuk aplikasi dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 33 yang menjelaskan:

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.

¹³ *Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi*, bab II: B.

¹⁴ *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan*, Pasal 5 ayat (8-9).

- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.¹⁵

Berdasar pada undang-undang tersebut, satuan pendidikan dapat menggunakan buku ajar yang disusun dengan menggunakan tiga bahasa (bahasa Arab, bahasa Daerah, dan bahasa Indonesia) sebagai bahasa pengantar untuk muatan pendidikan agama Islam. Materi utama dalam buku dimaksud ditulis dalam bahasa Arab. Guru memulai kegiatan belajar mengajarnya dengan membacakan *makna*-nya (menterjemah setiap kata dalam bahasa daerah serta menjelaskan kedudukannya dalam kalimat). Materi berbahasa Arab yang telah di-*makenani* tersebut kemudian diterjemah peserta didik ke dalam bahasa Indonesia, dengan bimbingan guru. Hasil terjemahan, setelah diteliti guru, ditulis peserta didik dalam kolom terjemah yang tersedia. Evaluasi hasil belajar dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dengan pola seperti ini, diharapkan peserta didik terbiasa memahami ajaran Islam dari sumber aslinya dan mengkomunikasikan ajaran itu dengan bahasa masyarakat di sekelilingnya.

Membiasakan penggunaan bahasa Arab, sebagaimana dikatakan Ibnu Taymiyah, memiliki pengaruh yang efektif pada kecerdasan akal, budi pekerti dan agama. Penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar pendidikan agama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama. Ibnu Taymiyah mengatakan:

¹⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3.

وَأَعْلَمَ أَنَّ اعْتِيَادَ اللُّغَةِ يُؤَثِّرُ فِي الْعَقْلِ، وَالْخُلُقِ، وَالدِّينِ تَأْتِيرًا قَوِيًّا بَيْنًا
 فَإِنَّ نَفْسَ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ مِنَ الدِّينِ، وَمَعْرِفَتُهَا فَرَضٌ وَاجِبٌ، فَإِنَّ
 فَهْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَرَضٌ، وَلَا يُفْهَمُ إِلَّا بِفَهْمِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَمَا لَا
 يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.¹⁶

Artinya: Ketahuilah bahwasannya pembiasaan bahasa (Arab) dapat berpengaruh secara efektif pada akal, budi pekerti, dan agama karena bahasa Arab itu sendiri merupakan bagian dari agama; mengetahuinya adalah fardu (wajib), karena memahami al-Qur'an dan al-Sunnah adalah fardu, sementara keduanya tidak dapat difahami kecuali dengan kemampuan bahasa Arab dan sesuatu yang merupakan keniscayaan untuk menyempurnakan kewajiban adalah juga wajib.

D. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif jenis Penelitian Tindakan Partisipatoris (*Participatory Action Research*). Jenis penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu meningkatkan kualitas para partisipan sehingga mereka mampu memecahkan masalah yang mereka alami. Creswell mengatakan bahwa tujuan *Participatory Action Research* adalah meningkatkan kualitas partisipan.¹⁷ Selain itu, Britha mikkelsen mengatakan bahwa tujuan dari *Action research* adalah memecahkan masalah.¹⁸ Jika apa yang dikatakan Creswell dan mikkelsen tersebut digabung, maka dapat dinyatakan bahwa tujuan *Participatory Action Research* adalah meningkatkan kualitas para

¹⁶ Ibnu Taymiyah, *Iqtiḍā al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm li Mukhālafati Aṣḥāb al-Jahīm* (Riyāḍ: Maktabat al-Rushd, tt.), I: 527.

¹⁷ John W. Creswell, *Educational Research Planning Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (Boston: Pearson Education, 2012), 282.

¹⁸ Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris* terj. Matheos Nalle, 281.

partisipan sehingga mereka mampu memecahkan masalah yang mereka alami.

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai partisipan, *katalisator*, *fasilitator*, *dinamisor*, dan *advocate*. Hasan Basri menjelaskan bahwa pendekatan *Participatory Action Research* menempatkan mahasiswa (peneliti) sebagai *fasilitator* (fasilitasi pertemuan), *katalisator* (sumber ide perubahan), dan *dinamisor* (penggerak masyarakat).¹⁹ Pendekatan *Participatory* ini oleh Creswell disebut juga sebagai *Advocacy*.²⁰

Data penelitian ini bersumber dari pelaku pendidikan di SMK Baitul Atieq, tokoh masyarakat dan dokumen-dokumen yang berisikan data-data yang terkait dengan rumusan penelitian. Data diambil dengan menggunakan metode observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Keabsahan data ditentukan dengan menggunakan uji kredibilitas yang meliputi kredibilitas sumber data, perbandingan antardata, dan triangulasi sumber dan teknik, serta menggunakan bahan referensi.

E. Temuan Penelitian dan Pembahasan

Dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat sampaikan kesimpulannya, sesuai dengan urutan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Problem pengembangan kurikulum muatan lokal Bahasa Arab di SMK Baitul Atieq Cepoko Berbek Nganjuk

¹⁹ Hasan Basri, "Mengenal KKN Berbasis PAR" dalam Nur Ahid et.al., *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata Berbasis Participatory Action Research* (Kediri: LP3M STAIN Kediri, 2010), 75.

²⁰ John W. Creswell, *Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches* (California: Sage, 2009), 9.

Problem pengembangan muatan lokal Bahasa Arab ke dalam kurikulum SMK Baitul Atieq Cepoko Berbek Nganjuk adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan mata pelajaran yang materinya sebenarnya dapat dikelompokkan kepada mata pelajaran pokok (wajib), sehingga banyak materi pelajaran yang tumpang tindih.
- b. Penambahan mata pelajaran yang tidak disertai dengan penambahan alokasi waktu yang memadai, sehingga banyak mata pelajaran yang tidak memiliki alokasi waktu sebagaimana ditetapkan Permendiknas 22/2006.
- c. Mata pelajaran muatan lokal tidak ditentukan SK dan KD-nya.

Sebagaimana diterangkan pada bab II dalam kajian teori bahwa Pengembangan muatan lokal yang sesuai dengan mata pelajaran pokok (wajib) yang ada dilakukan dengan cara memasukkan materinya ke dalam mata pelajaran pokok yang sesuai. Hal ini dapat dipahami dari pengertian KTSP, sebagaimana dijelaskan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu “Kurikulum satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.”²¹

Seharusnya buku ajar yang disusun dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar untuk kelas X dan XI, karena di antara tujuan belajarnya adalah membekali kemampuan dasar *maknani* (menterjemah teks Arab perkata ke dalam bahasa daerah dan menjelaskan kedudukannya dalam kalimat) kepada murid. Jika materi yang terdapat dalam Standar Isi SMK 2008 belum mencukupi kebutuhan satuan pendidikan, maka ditambahkan muatan dan kedalaman materinya sesuai

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional, Pasal 1 ayat (15).

kebutuhan. Dengan cara seperti itu, tidak lagi ada materi pelajaran yang tumpang tindih.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya problem pengembangan kurikulum muatan lokal Bahasa Arab di SMK Baitul Atieq Cepoko Berbek Nganjuk

Faktor-faktor penyebab terjadinya problem pengembangan kurikulum muatan lokal Bahasa Arab di SMK Baitul Atieq Cepoko Berbek Nganjuk adalah sebagai berikut:

- a. Beberapa faktor penyebab terjadinya penambahan mata pelajaran yang materinya sebenarnya dapat dikelompokkan kepada mata pelajaran pokok (wajib), sehingga banyak materi pelajaran yang tumpang tindih, adalah sebagai berikut:
 - 1) Tidak adanya pengertian tentang teori penambahan mata pelajaran dan tidak ada yang membimbing tentang teori itu.
 - 2) Latar belakang SMK yang pada awalnya merupakan madrasah pesantren tradisional yang kurikulumnya ditentukan berdasarkan tingkatan kitab. Sedangkan kurikulum nasional diposisikan sebagai pelajaran tambahan.
 - 3) Kemampuan membaca (maknani) Bahasa Arab menjadi tolok ukur kemampuan murid dalam bidang agama, sehingga kurikulum muatan lokal yang buku ajarnya adalah buku-buku yang berbahasa Arab dan pegon harus dipertahankan.
- b. Beberapa faktor penyebab terjadinya penambahan mata pelajaran yang tidak ditentukan SK dan KD-nya:
 - 1) Tidak adanya pengertian tentang SK dan KD yang seharusnya disusun sendiri oleh madrasah untuk SK dan KD muatan lokal,

- 2) Latar belakang SMK yang pada awalnya merupakan pondok pesantren tradisional yang menentukan buku ajarnya berdasarkan tingkatan kitab.
- c. Beberapa faktor penyebab terjadinya penambahan mata pelajaran yang tidak disertai dengan penambahan jam pembelajaran yang memadai, sehingga banyak mata pelajaran pokok yang tidak memiliki waktu sesuai yang telah ditentukan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan Permenag Nomor 2 tahun 2008.

Tidak ditambahnya alokasi waktu belajar yang sesuai dengan penambahan mata pelajaran yang ada dikarenakan faktor ketidak siapan lembaga. Dalam hal ini, lembaga tidak memiliki dana yang cukup bila jam belajarnya ditambah, sehingga pembelajaran hanya dilaksanakan selama delapan jam pembelajaran setiap hari yaitu mulai jam 06.45 sampai dengan jam 13.00.

Dengan demikian, semua penyebab terjadinya problematika pengembangan muatan lokal Bahasa Arab ke dalam kurikulum SMK Baitul Atieq sebagaimana dijelaskan secara rinci di atas dapat disederhanakan sebagai berikut: terjadinya problematika pengembangan muatan lokal Bahasa Arab ke dalam kurikulum SMK Baitul Atieq dikarenakan SMK Baitul Atieq tidak mampu mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas pengembangan kurikulum dengan memperhatikan muatan lokal sebagai bagian integral KTSP sebagaimana dijelaskan dalam bab II (kajian teori).

Di antara asas yang berkembang di masyarakat SMK Baitul Atieq adalah pandangan kemampuan membaca Bahasa Arab sebagai prasyarat kemampuan seseorang dalam memahami agama, karena tanpa kemampuan membaca Bahasa Arab seseorang tidak mampu memahami agama

langsung dari sumbernya. Betapapun pandainya seseorang tapi ketika belum mampu memahami agama langsung dari sumbernya dan masih tergantung pada perantara (penerjemah), maka ia dinilai belum mandiri dan belum mumpuni dalam bidang agama, karena sulit membedakan antara terjemahan dalam konteks tertentu dengan kebohongan.²² Pandangan yang merupakan asas yang berkembang di masyarakat SMK Baitul Atieq ini sesuai dengan pandangan Ibnu Taymiyah, sebagaimana diuraikan pada bab II (kajian teori), bahwa memahami bahasa Arab untuk memahami al-Qur'an dan al-Sunnah adalah wajib. Dan untuk pemahaman bahasa yang baik perlu Adanya pembiasaan (*i'tiyād*).²³ Pembiasaan menggunakan bahasa Arab dalam konteks buku ajar adalah menggunakan bahasa itu sebagai bahasa pengantar.

Prinsip dan asas tersebut sepenuhnya disadari oleh SMK Baitul Atieq dan karenanya, SMK Baitul Atieq mempertahankan muatan lokal berupa beberapa mata pelajaran muatan lokal yang menggunakan kitab berbahasa Arab (Durus Al lughah Al 'arabiyah). Hanya saja, penambahan mata pelajaran muatan lokal tersebut tidak diintegrasikan dengan pelajaran pokok, sehingga terjadi tumpang tindih materi dan kekurangan jam pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti selalu mensosialisasikan pengintegrasian tersebut supaya SMK Baitul Atieq paham dan mampu

²² Sebagai contoh, misalnya Surah Al-Şāffāt (37) ayat 95-96:

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
Lafal ما pada ayat *وَمَا تَعْمَلُونَ* memiliki kemungkinan beberapa arti, yaitu *maşdariyah*, *maşsulah*, *nafi*, atau *istifham*. Ketika ayat tersebut diterjemah, maka arti ayat tersebut terarah pada salah satu arti yang ada, sehingga terjemahan tidak menggambarkan yang sebenarnya (kebohongan). Dalam dunia penerjemahan, penerjemah sering dihadapkan pada dua pilihan, bodoh atau bohong; Bodoh karena jika diterjemah sesuai redaksi yang ada, maka sulit dipahami pembaca; Bohong karena jika diterjemah dengan redaksi lain yang mudah dipahami, maka terjemahan itu tidak menggambarkan teks aslinya.

²³ Ibnu Taymiyah, *Iqtidā al-Şirāṭ al-Mustaḳīm*, I: 527.

mengintegrasikan. Sebab kalau tidak, mustahil hal tersebut dilakukan karena suatu kaidah, sebagaimana dikatakan al-Zandānī dan al-Ghazālī, «فَاقِدُ الشَّيْءَ لَا يُعْطِيهِ»²⁴ (Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak mampu memberi).

3. Solusi yang dirumuskan untuk mengatasi problem pengembangan kurikulum muatan lokal Bahasa Arab di SMK Baitul Atieq Cepoko Berbek Nganjuk

Solusi yang dirumuskan untuk mengatasi problem yang terjadi pada pengembangan muatan lokal Bahasa Arab ke dalam kurikulum SMK Baitul Atieq adalah sebagai berikut:

- a. SMK Baitul Atieq mengintegrasikan kurikulum PAI Kemenag dan kurikulum Madin (PAI muatan lokal), dengan cara mengidentifikasi Standar Isi SMK 2008 untuk ditambah muatan dan kedalaman materinya serta disusun dalam buku ajar yang menggunakan bahasa Arab dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar untuk kelas X menggunakan bahasa Arab untuk kelas XI,
- b. SMK Baitul Atieq menentukan SK dan KD muatan lokal yang materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran wajib atau terlalu luas subtansinya (nahwu, Shorof, dan R. Maḥīd), dan
- c. Untuk mendukung dua hal sebagaimana dalam diktum a dan b, diadakan bimbingan pengembangan muatan lokal.

Pada kelas X, murid SMK Baitul Atieq sudah mulai diajari menulis huruf hijaiyah secara terpisah dan bersambung. Kompetensi yang menurut

²⁴ al-Zandānī , *Tawḥīd al-Khāliq* (CD-ROM: al-Maktabah al-Shāmilah V, Ridwana Mediakita, 2010, Digital), 23; Muḥammad al-Ghazālī, *Fann al-Dhikri wa al-Du‘ā’i ‘inda Khātam al-Anbiyā’i* (Mesir: Dāru Nahḍah, tt.), 107.

Standar Isi SMK 2008 semestinya diajarkan pada kelas 2 ini diajarkan di kelas satu, karena lulusan RA yang juga belajar di TPQ pada sore hari sudah mampu mengidentifikasi huruf hijaiyah.

Sebagai indikator kemampuan menulis huruf hijaiyah secara terpisah dan bersambung, murid mampu menulis dengan didikte. Di sini, dibedakan antara menulis dan menggambar. Kalau murid melihat tulisan kemudian menirukan tulisan tersebut berdasarkan ingatannya, maka itu berarti menggambar, bukan menulis. Kalau murid mendengar lalu menulis apa yang ia dengar, maka itu berarti menulis, karena menggunakan ilmunya menulis (mampu membedakan huruf hijaiyah di awal, di tengah, dan di akhir kata).

Demikian pula untuk kelas XI ke atas bila dibacakan dua kata Arab ia dapat menulis dengan benar, berarti ia sudah memahami kata (Arab: *kalimah*). misalnya, ketika dibacakan lafal تعليم المتعلم atau يوم الحساب kemudian murid menulis apa yang didengarnya itu menjadi تعليم المتعلم atau يوم الحساب berarti ia belum paham bangunan kata. Kalau murid tidak mampu menulis dua kata, lalu bagaimana ia mampu menulis ayat-ayat al-Qur'an? Kalau lulusan pendidikan dasar dan menengah tidak mampu menulis ayat-ayat al-Qur'an dengan benar, maka kecil harapan ia mampu menulis ayat-ayat al-Qur'an dengan benar walaupun sudah sarjana.

Di sini, ilmu saraf dan nahwu sangat dibutuhkan. Pengalaman peneliti menunjukkan bahwa anak usia kelas X dan XI sudah harus mampu memahami ilmu nahwu dan saraf. Waktu itu, peneliti mengajar XI murid yang rata-rata duduk di kelas X SMK. Peneliti mengajar mereka 1 kali pertemuan (1 pertemuan = 30 menit) dalam satu Minggu. Pada semester kedua dari tahun ketiga (ketika mereka duduk di kelas XI SMK) peneliti bacakan kitab *Durus Al lughah Al 'arabiyah* bab pertama.

Dan hasilnya pun mereka bertahap dalam memahami maksud dan tarkibnya. Baik pola kalimat (Arab: *jumlah*) dan tentunya juga materi saraf yang mengajarkan bentuk-bentuk kata (Arab: *kalimah*).

F. Penutup

Untuk mengetahui hasil penelitian, peneliti perlu menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Problem pengembangan kurikulum muatan lokal Bahasa Arab di SMK Baitul Atieq Cepoko Berbek Nganjuk adalah sebagai berikut:
 - 1) Penambahan mata pelajaran yang materinya sebenarnya dapat dikelompokkan kepada mata pelajaran pokok, sehingga banyak materi pelajaran yang tumpang tindih.
 - 2) Penambahan mata pelajaran yang tidak disertai dengan penambahan jam pembelajaran (alokasi waktu) yang memadai, sehingga banyak mata pelajaran pokok yang tidak memiliki waktu sesuai dengan yang telah ditentukan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006.
 - 3) Penambahan mata pelajaran muatan lokal yang tidak ditentukan SK dan KD-nya.
- b. Faktor penyebab terjadinya problem pengembangan kurikulum muatan lokal Bahasa Arab di SMK Baitul Atieq Cepoko Berbek Nganjuk adalah sebagai berikut:
 - 1) SMK Baitul Atieq belum mampu mengintegrasikan mata pelajaran pokok dan muatan lokal Bahasa Arab yang menjadi tuntutan masyarakatnya,
 - 2) Keterbatasan dana untuk mengembangkan SMK Baitul Atieq menjadi full-day madrasah, dan

- 3) Latar belakang SMK Baitul Atieq yang pada awalnya merupakan pondok pesantren tradisional yang menentukan buku ajarnya berdasarkan tingkatan kitab.
- c. Solusi yang dirumuskan untuk mengatasi problem pengembangan kurikulum muatan lokal Bahasa Arab di SMK Baitul Atieq Cepoko Berbek Nganjuk adalah sebagai berikut:
- 1) Melakukan sosialisasi dan bimbingan penyusunan SK dan KD muatan lokal dan pengintegrasian PAI kurikulum nasional dan PAI muatan lokal yang sesuai,
 - 2) Menghapus mata pelajaran PAI tambahan dan memasukkan materinya ke dalam pelajaran PAI yang ada dengan mengidentifikasi Standar SMK 2008, menambah muatan dan kedalaman materinya, serta mengembangkannya ke dalam buku ajar yang menggunakan bahasa Arab (*Durus Al lughab Al 'arabiyah*), dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar,
 - 3) Menyusun SK dan KD mata pelajaran tambahan yang tidak dapat menjadi bagian dari mata pelajaran pokok yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Creswell, John W. *Educational Research Planning Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Boston: Pearson Education, 2012.

----- . *Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: Sage, 2009.

Basri, Hasan. "Mengenal KKN Berbasis PAR" dalam *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata Berbasis Participatory Action Research* karya Nur Ahid et.al. Kediri: LP3M STAIN Kediri, 2010.

Al-Ghazālī, Muḥammad. *Fann al-Dhikri wa al-Du'ā'i 'inda Khātam al-Anbiyā'i*. Mesir: Dāru Nahḍah, tt.

Hadi, Anis Tanwir. *Pengantar Fikih 4*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009.

Ibnu 'Aqīl, *Sharḥ Ibni 'Aqīl 'alā Aliyat Ibni Mālik*. Kaero: Dār al-Turāth, 1980.

Ibnu Taymiyah. *Iqtidā al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm li Mukhālafati Aṣḥāb al-Jahīm*. Riyād: Maktabat al-Rushd, tt.

Mikkelsen, Britha. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan* terj. Matheos Nalle. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Minarti, Sri. *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Jogjakarta: Ar-ruz Media, 2011.

Muhaimin et. al. *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Mulyasa, Enco. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002,

Al-Zandānī. *Tanḥīd al-Khāliq*. CD-ROM: al-Maktabah al-ShāSMKlah V, Ridwana Mediakita, 2010, Digital.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Nuansa Aulia, 2009.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Nuansa Aulia, 2009.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Nuansa Aulia, 2009.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.

Mapenda Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur. *Pedoman dan Implementasi Pengembangan KTSP di Sekolah Menengah Kejuruan*. Surabaya: Departemen Agama, 2009.